



Judul : Banyak PTS kurang sehat. Dede: gabungkan saja dengan PTN
Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Banyak PTS Kurang Sehat

Dede: Gabungkan Saja Dengan PTN

WAKIL Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf meminta Pemerintah melakukan penggabungan perguruan tinggi. Pasalnya, banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang kurang sehat. Bahkan, jumlahnya mencapai 90 persen dari total 3.128 perguruan tinggi di Indonesia.

Dede bilang, ada masalah kesenjangan antara PTS dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal ini terlihat dari pola belanja negara khususnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Bantuan bagi PTS kurang dari enam persen dari anggaran. Sementara PTN menerima kurang lebih 94 persen dari total anggaran.

"Dikotomi ini seharusnya tidak terjadi, mengingat PTN dan PTS memiliki tanggung jawab sama dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi," kata Dede dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perguruan Tinggi DPR bersama sejumlah guru besar kampus di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Selain itu, Dede menyoy-

roti soal kualitas pendidikan. Tantangan yang harus dihadapi PTS adalah proses pendidikan terjamin dengan manajemen mutu yang baik. Terlebih, saat ini PTS mendidik 72 persen mahasiswa, sehingga perhatian pada kualitas perlu ditingkatkan.

"Upaya-upaya PTS untuk meningkatkan sarana dan prasarana, mutu dosen, mutu lulusan harus dapat dukungan dari Pemerintah," imbuh mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Pasalnya, kata Dede, kondisi dosen yang merupakan tulang punggung pendidikan masih banyak yang memprihatinkan. Sekitar 49 persen dosen masih berpendidikan Strata I dan hampir 50 persen dosen berstatus tidak tetap atau berinduk lebih dari dua organisasi.

"Hal itu menyebabkan pekerjaan dosen menjadi tidak optimal, sehingga perlu peningkatan kompetensi dan kesejahteraan," saran dia.

Dede menyebut, saat ini dunia industri membutuhkan banyak sarjana berbasis teknik untuk diterjunkan ke industri manufaktur. Namun,

perguruan tinggi justru banyak menawarkan pendidikan berbasis sosial. Hal ini terjadi karena dosen-dosen di PTS hanya dapat honor Rp 1,5 juta per bulan.

"Memprihatinkan sekali," ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut.

Dede menekankan, perguruan tinggi mestinya dapat mengembangkan diri menjadi universitas riset yang mampu menghasilkan jurnal paten dan hak kekayaan intelektual (HAKI).

"Masalahnya riset itu bisa dipakai atau tidak oleh dunia usaha dan dunia industri, atau sekadar simbol-simbol," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menambahkan, dunia pendidikan terutama pendidikan tinggi dituntut dapat menjamin mutu dan kualitas pendidikan tinggi.

"Peran PTS perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari seluruh pihak dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi," ujarnya. ■ TIF